

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan asli desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangna. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal daripemeritah daerah maupun pemerintah pusat (Atmaja, et al, 2018).

Desa merupakan bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujutkan otonomi desa dan mendorong perekonomian di pedesaan, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dengan nama lain. Lembaga yang berbasis ekonomi ini merupakan sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes pada era otonomi desa saat ini, tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa”.

Sehubungan dengan sistem desentralisasi di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan asli desa tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian wewenang ini sangat diharapkan suatu daerah mampu meningkatkan kapasitas pembangunan di daerahnya serta timbulnya semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah (Irawati&Martini, 2017). Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat diberbagai daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah mendapat kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya atau asset desa yang dimiliki sehingga dapat dimaksimalkan dengan baik. Pengelolaan asset juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan desa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (Didiharyono dkk, 2017).

Pendapatan asli desa dapat dikatakan sebagai suatu patokan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan untuk

menyelenggarakan pembangunan desa sebagai penambahan atau pemasukan sumber pendapatan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, sumber pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain. Salah satu bentuk dari kontribusi dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan istilah BUMDes. BUMDes memiliki landasan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*), sebagai lembaga social yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Jurhasana, 2021).

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan

untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa.

Di wilayah Kabupaten Ende, perkembangan BUMDes cukup mendapat dorongan kuat dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari 255 desa di Kabupten Ende terdapat 187 desa yang sudah memiliki BUMDes. Desa Wolotopo adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Ende dan telah memiliki BUMDes yang berdiri pada 24 Juli 2017 tetapi mulai aktif sejak 2018. BUMDes ini diberi nama BUMDes Poto Bo'o. Berdasarkan data dari badan pengurus, BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha, diantaranya:

Tabel 1.1

Daftar Unit Usaha BUMDes Poto Bo'o

No	Unit Usaha	Tetapan Harga
1	Penjualan Beras	Rp. 450.000 per karung
2	Penjualan Minyak Tanah	Rp. 800.000 per drum
3	Sewa Kursi	- kedukaan Rp. 500,00 per kursi - pernikahan dll Rp. 1000,00 per kursi

Sumber: BUMDes Poto Bo'o 2023

Dari penetapan tiga unit usaha diatas dialokasikannya anggaran dari Dana Desa sebesar Rp. 90.000.000 pada tahun 2018 sebagai modal awal. Ditahun-

tahun berikut BUMDes tidak lagi mendapat penambahan dana dari desa, BUMDes beroperasi menggunakan hasil penjualan dan sewa unit usaha.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu pengurus BUMDes, ketiga unit usaha tersebut menjadi penyumbang dalam anggaran PADes, dengan kontribusi sebesar 10% . Dari hasil usaha ketiga unit itu digunakan sebagai pendapatan asli desa dan biaya operasional. Berikut ini merupakan hasil penjualan dan kontribusi BUMDes untuk Desa pada tahun 2018-2022 BUMDes Poto Bo'o.

Tabel 1.2

Hasil Penjualan Dan Kontribusi BUMDes Poto Bo'o

No	Tahun	Hasil Penjualan	Kontribusi ke Desa
1	2018	Rp. 4.022.500	(thn awal operasi)
2	2019	Rp. 36.800.000	Rp.2.500.000
3	2020	Rp. 33.060.000	Rp.2.479.500
4	2021	Rp. 29.105.000	Rp.2.182.875
5	2022	Rp.28.540.000	Rp.2.140.000

Sumber: BUMDes Poto Bo'o 2022

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa pada lima tahun terakhir, hasil penjualan dan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari BUMDes mengalami penurunan yang cukup drastis. Dimana sejak 2019 keuntungan dan kontribusi BUMDes

terus menurun, jika dilihat dari besaran alokasi modal awal dan pendapatan PADes maka terlihat kurang keseimbangan diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam manajemen BUMDes Poto Bo'o dengan penelitian yang berjudul **“Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Poto Bo'o Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Wolotopo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende”**. Langkah ini dianggap penting sebagai sumbangan pikiran demi memajukan pembangunan daerah Kabupaten Ende dan khususnya Desa Wolotopo.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang di atas adalah:

1. Bagaimana manajemen BUMDes Poto Bo'o agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen BUMDes Poto Bo'o dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menggambarkan manajemen BUMDes Poto Bo'o dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajamen BUMDes Poto Bo'o dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat berarti dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan (*input*) dan rujukan bagi pemerintah Desa Wolotopo dalam kapasitas sebagai pembuat kebijakan, sehingga mampu mengambil langkah-langkah yang strategis dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMDes.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengurus BUMDes sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk mendukung perkembangan BUMDes khususnya masyarakat Desa Wolotopo dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pembelajaran akademis tentang manajemen pelayanan publik, dan juga berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.